

PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rudianto**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara**

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Moh. Mahfud MD.**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua:

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

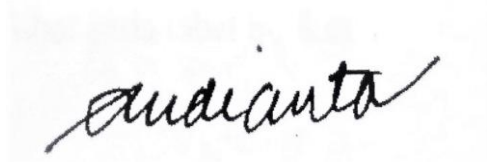
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Moh. Mahfud MD.



Rudianto

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	80%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	80%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	19
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi..	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4
3. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	100%

Jumlah Anggaran:

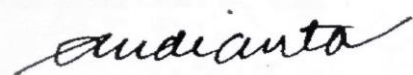
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bidang Koordinasi Pertahanan Negara **Rp 14.813.332.000,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).**

**Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan**

Moh. Mahfud MD.

Jakarta, Januari 2020

**Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara**



Rudianto

**MANUAL INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA**

Sasaran Strategis	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi	<p>Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.</p> <p>1. Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF)</p> <p>Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.</p> <p>2. Industri pertahanan</p> <p>Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari <i>global supply chain</i>.</p>
Sumber Data	Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan

Cara Menghitung	<p>1. <i>Persentase Capaian MEF</i></p> $\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ <p>2. <i>Persentase Capaian Industri Pertahanan</i></p> $\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dok Perencanaan Nasional}} \times 100\%$ <p>3. <i>Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg</i></p> $\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$
Indikator Kinerja 2	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkooor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\Sigma = \mu (\%) \text{ capaian rekomdasi kebijakan bidang hanneg sesuai dokumen perencanaan nasional}$
Indikator Kinerja 3	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti
Definisi	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkooor Hanneg yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\Sigma = \mu (\%) \text{ capaian rekomendasi kebijakan bidang hanneg yang ditindaklanjuti}$

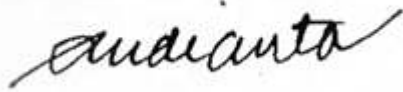
Sasaran Strategis	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal
Indikator Kinerja 1	Nilai SAKIP
Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.</p> <p>Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data	Hasil Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung	<p>Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
Indikator Kinerja 2	Nilai PMPRB
Definisi	<p>Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penataan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber Data	Laporan Penilaian Mandiri dari masing-masing kedeputian
Cara Menghitung	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 – 23,5
Indikator Kinerja 3	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan
Sumber Data	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Indikator Kinerja 4	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
Definisi	Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
Sumber Data	Hasil survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkooor Hanneg dari stakeholders
Cara Menghitung	$\sum = \frac{\text{Indeks pelayanan ProgEv} + \text{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$
Sasaran Strategis	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal
Indikator Kinerja 1	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.
Definisi	Tugas yang diperintahkan langsung oleh pimpinan kepada sekretaris dengan penyelesaiannya secara khusus

Sumber Data	Laporan yang disusun oleh penanggungjawab kegiatan di dalam unit keasdepan
Cara Menghitung	$\Sigma = \frac{\text{jumlah capaian tugas khusus yang diselesaikan}}{\text{jumlah capain tugas khusus}} \times 100\%$

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidkoo
Pertahanan Negara



Rudianto